



KMS Bukan Berarti Gratis

Hari ini Pendaftaran Siswa KMS Ditutup

JOGJA - Antusiasme peserta calon PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dari kelompok KMS (Keluarga Menuju Sejahtera) di Kota Jogjakarta bisa dibilang tinggi. Dari total siswa KMS SD menuju SMP sebanyak 1063 lulusan, hingga hari kelima kemarin (sehari sebelum ditutup) yang mendaftar sudah 1008 lulusan SD. Sementara untuk KMS SMP menuju SMA, dari total 1010 lulusan, yang mendaftar sudah 948 lulusan.

Kepala Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta Drs. HM. Mawardi Dalga, MM mengungkapkan, hingga Jumat (17/6) kemarin, jumlah siswa KMS yang melakukan pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota sebanyak 1008 lulusan SD menuju SMP, dan 948 lulusan SMP menuju SMA.

"Jumlah keseluruhan siswa KMS SD sebanyak 1063 dan SMP 1010. Sehingga, jumlah siswa KMS yang belum melakukan pendaftaran hanya 55 lulusan SD dan 26 lulusan SMP," katanya. Mawardi memprediksikan,

pada hari terakhir (18/6) hari ini, jumlah calon peserta PPDB KMS yang melakukan pendaftaran hanya sekitar 81 orang. "Itu jika melakukan pendaftaran semua," tandasnya.

Lebih jauh Mawardi mengatakan, tahun ini, nilai untuk memasuki sekolah lanjutan, baik SMP maupun SMA di lingkungan Kota Jogjakarta, naik 0,5 - 1 poin, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Yang harus menjadi catatan, bahwa anak KMS bukan bersekolah gratis lho," tandas Mawardi. Ditambahkan, sejauh ini *image* masyarakat luar

kota menganggap bahwa anak KMS itu bersekolah gratis tanpa biaya, padahal sebenarnya biaya sekolah mereka ditanggung oleh Pemerintah Kota.

Dijelaskan, untuk lulusan SD per anak memperoleh (Biaya Operasional Sekolah) BOS dari pusat sebesar Rp 400.000 dan BOS dari Kota Rp 250.000. Sedangkan SMP memperoleh BOS Pusat Rp 575.000 dan BOS Kota Rp 625.000. "Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jogja memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak KMS," ujarnya.

Sebagai perbandingan, un-

tuk di kabupaten, BOS yang diterima anak SD sebesar Rp 395.000 dan SMP Rp 575.000.

"Nominal itu hanya dari pusat, dan berarti tidak ada tambahan dari kabupaten," ungkapny.

Pemperlakuan khusus terhadap KMS ini merupakan program Pemerintah Kota Jogjakarta untuk melindungi anak-anak dalam lingkungan kota. Selama ini kenyataannya pendidikan di kota lebih baik dari kabupaten. "Buktinya banyak anak daerah yang berbondong-bondong untuk bersekolah di lingkungan Kota Jogja," pungkasnya. (c7)

kepada Yth. :
 ta Yogyakarta
 Walikota Yogyakarta
 taris Daerah

in

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 17 Mei 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005